



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

**KAMIS, 8 NOVEMBER 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Temuan BPK di Benteng, Kejati Terbitkan 2 Sprindik**

**Anggaran Tahun 2016 di Setda Rp 9,2 Miliar**

**BENGKULU** - Sekalipun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran tahun 2016 senilai Rp 9,2 miliar di Setda Benteng hanya menyisakan Rp 200 yang belum dikembalikan, Kejati Bengkulu tetap memproses temuan itu. Malah telah diterbitkan dua sprindik (surat perintah penyidikan) oleh Kejati Bengkulu. Satu sprindik untuk temuan di Setda, satunya lagi untuk temuan BPK di DPPKA Benteng.

Disampaikan Aspidus Kejati Bengkulu, Henri Nainggolan, SH, MH, menindaklanjuti terbitkan

sprindik tersebut, penyidik Kejati mulai melakukan pemeriksaan kembali saksi-saksi yang berkaitan dengan pengusutan tersebut. Mulai dari Sekda Benteng tahun 2016 (sekarang mantan), Kepala Inspektorat saat itu, bendahara rutin Setda Benteng dan PPTK. "Ya kita memang melakukan pemanggilan ulang untuk pemeriksaan kembali sejumlah saksi-saksi guna menyempurnakan berkas perkara. Untuk saat ini kita fokus dulu yang di Setda, berikutnya yang di



**HENRI NAI**

DPPKA," ujarnya. Pengusutan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran di Setda dan sejumlah OPD di Kabupaten Benteng ini, awalnya dilakukan tim intelijen Kejati Bengkulu. Dari penyelidikan tersebut diketahui dari total anggaran Rp 9,2 miliar yang jadi temuan BPK, sebanyak Rp 6 miliar sudah dikembalikan, menyisakan Rp 3,2 miliar. Kemudian, dari Intelijen penanganan perkara dilanjutkan Pidsus. Selama



**INGGOLAN**

pengusutan dilakukan Pidsus Kejati, pengembalian indikasi kerugian negara tersebut terus dilakukan. Alhasil, secara umum sekarang dari total Rp 3,2 miliar sisa yang belum dikembalikan tinggal Rp 200 juta.

Terkait telah dikembalikannya indikasi kerugian negara, ditegaskan Henri Nainggolan tak berarti menghentikan perkara tersebut. "Pengembalian kerugian negara bukan berarti penghentian pengusutan. Tetapi, lihat dulu kasusnya bagaimana ini nanti ke depannya. Untuk apa, ini nanti akan menjadi pembelajaran bagi yang lain-lain," pungkasnya.(zie)